

## TAJUK RENCANA

### Tak Perlu Ragu Ikut Vaksinasi

**VAKSINASI** Covid-19 sudah dimulai. Diawali orang nomor satu di negeri ini, Presiden Jokowi, yang disuntik vaksin. Disusul para pejabat dan tokoh pusat dari berbagai kalangan, Rabu (13/1), disusul para pejabat dan tokoh tingkat provinsi dan kabupaten, Kamis (14/1). Dimulainya vaksinasi ini diharapkan menjadi awal momentum kemenangan kita dalam melawan virus Corona.

Tentu dimulainya imunisasi agar kebal terhadap virus Corona ini sudah mempertimbangkan banyak hal secara mendalam. Antara lain menyangkut kehalalan maupun keamanan. Dari sisi legalitas, proses sertifikasi halal vaksin Sinovac telah dilakukan sesuai regulasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

MUI sudah menerbitkan Surat Ketetapan Halal vaksin Sinovac. BPOM juga telah merilis Emergency Use Authorization (EUA) atau Izin Penggunaan Darurat atas vaksin tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga sudah mengeluarkan Sertifikat Halal Vaksin Sinovac untuk Covid-19, yang dikeluarkan 12 Januari 2020 dengan nomor ID0041000019421020. Sertifikat halal itu mencakup tiga nama produk vaksin Covid-19 yang diproduksi PT Bio Farma (Persero), yaitu CoronaVac, Vaksin Covid-19, dan Cov2Bio.

Jadi mau apa lagi, tidak ada yang perlu diragukan menyangkut kehalalan, kesucian dan keamanan (*thayyib*) vaksin Sinovac. Dari pelaksanaan vaksinasi dua hari kemarin juga tidak ditemukan indikasi ketidakamanan pada mereka yang sudah divaksin. Hal ini terlihat dari berbagai testimoni para penerima vaksin. Mereka juga terlihat sehat-sehat saja dan bisa beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya, akan dilakukan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air.

Memang, masih ada yang kontra,

masih ragu atau belum mau divaksin. Tapi dengan dilakukannya vaksinasi yang diawali tokoh masyarakat ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi penerima vaksin berikutnya. Dengan begitu bisa meyakinkan masyarakat sebagai calon penerima vaksin, bahwa vaksin yang mereka terima aman. Pada akhirnya, kita semua mesti divaksin agar tubuh kebal terhadap virus Corona.

Sebagaimana diketahui, sudah berbulan-bulan ini kita dihantui makhluk berbahaya yang sangat kecil namun mematikan. Korban pun sudah berjatuhan. Kita juga sudah berusaha bersama-sama secara lahir dan batin untuk melawan musuh yang tidak kelihatan ini. Namun kenyataannya, serangan virus Corona belum surut juga. Bahkan saat ini kebanyakan bed rumah sakit sudah penuh, sehingga harus dibangun shelter-shelter untuk menangani atau mengisolasi, di samping banyak juga yang isolasi mandiri. Banyak daerah yang sebelumnya zona hijau, sekarang menjadi zona merah, sehingga di Jawa dan Bali diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kita semua pasti ingin segera keluar dari suasana mencekam yang menghantui selama ini. Suasana yang selalu diliputi rasa kekhawatiran dan was-was terhadap ancaman yang mungkin datang dari lingkungan sekitar kita. Suasana yang menyebabkan seluruh aktivitas manusia terganggu. Tentunya kita merindukan suasana seperti dulu kala, di mana semua aktivitas manusia bisa berjalan normal, roda kehidupan berputar lancar, serta terbebas dari ancaman musuh yang tidak kelihatan dan selalu menghantui kita. Adanya vaksin Covid-19 diharapkan menjadi pintu masuk ke keadaan yang kita idam-idamkan bersama.

Karena itu mari terus kita dengungkan bersama, 'vaksin Covid-19, siapa takut?' □

## Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi

**TEKA-TEKI** calon Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo terjawab sudah. Rabu (13/1) Presiden Jokowi telah menyampaikan usulan nama calon tunggal Kapolri ke DPR yakni Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim di Mabes Polri. Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, yang akan memasuki masa purna tugas pada 1 Februari 2021 nanti.

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo Listyo adalah sosok yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Ia menjabat sebagai Kapolres Solo pada 2011 saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan Listyo dan Jokowi berlanjut ketika Jokowi menjadi Presiden. Pada 2014, Listyo pun menjadi ajudan Jokowi. Setelah tidak menjadi ajudan Jokowi, Listyo menduduki sejumlah jabatan di Korps Bhayangkara yakni Kapolda Banten pada 2016-2018 dan Kadiv Propam Polri pada 2018-2019 sebelum diangkat menjadi Kepala Bareskrim.

**Rekam Jejak**  
Selain itu terdapat beberapa peristiwa yang menyedot perhatian publik selama masa kepemimpinan Listyo di Bareskrim. Salah satu yang menarik yaitu penangkapan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang telah menjadi buronan selama 11 tahun. Listyo pun membongkar praktik suap terkait pelarian Djoko Tjandra. Skandal tersebut melibatkan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Karo Korwas PPNB Bareskrim Polri Prasetyo Utomo. Pada Desember 2019, Bareskrim juga menangkap dua pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Selanjutnya Komjen Pol Sigit Listyo Prabowo akan mengikuti *fit and proper test* di Komisi III DPR RI. DPR RI dalam hal ini Komisi III atau Komisi

### Baharuddin Kamba

Hukum memiliki waktu 20 hari terhingga sejak Surat Presiden (Surpres) Jokowi diterima untuk memutuskan disetujui atau tidak calon Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi. Dapat dipastikan proses *fit and proper test* calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi berjalan mulus di Komisi III DPR RI.

Jika merujuk pada hasil survei

*Desember 2018 misalnya, masyarakat yang menilai kinerja KPK itu efektif ada di angka 84,9%.*

*Namun Desember 2020 turun menjadi 65%.*

*Demikian juga dengan kinerja Presiden dalam memberantas korupsi itu efektivitasnya menurun dari 75,7% menjadi 67%.*

*Polisi juga mengalami penurunan efektivitas dari 65,5% menjadi 59,7%.*

Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait tren persepsi publik tentang korupsi di Indonesia menyebutkan terjadi penurunan persepsi terkait kinerja KPK, Presiden dan Polisi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pada Desember 2018 misalnya, masyarakat yang menilai kinerja KPK itu efektif ada di angka 84,9%. Namun Desember 2020 turun menjadi 65%. Demikian juga dengan kinerja Presiden dalam memberantas korupsi itu efektivitasnya menurun dari 75,7% menjadi 67%. Polisi juga mengalami penurunan efektivitas dari 65,5% menjadi 59,7%. Sementara tahun 2019, LSI merilis tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri berada

di angka 72,1%. Sementara tahun 2018, angka kepercayaan masyarakat kepada Polri mencapai angka 87,8%.

Sedangkan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) merilis hasil survei terhadap kinerja Polri tahun 2020. Hasilnya, kepuasan publik terhadap pelayanan Polri cukup tinggi, yakni 82,9%. Menurut Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan tingginya kehadiran TNI dan Polri dirasakan masyarakat selama pandemic, menjadi di antara alasannya.

### Sebuah Harapan

Kita berharap banyak kepada calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo pilihan Jokowi ini memiliki komitmen yang tinggi dan serius dalam penindakan pemberantasan kasus korupsi meskipun itu terjadi di internal kepolisian. Publik tentunya juga tidak berharap praktik tidak baik pada tahun 2015 silam terulang lagi. Tatkal Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka KPK tak berselang lama setelah Presiden Jokowi merekomendasikan kepada DPR RI.

Namun, Komjen Pol Budi Gunawan saat itu menang di praperadilan. Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi itulah yang terbaik dari yang baik. Dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan. □

\*) **Baharuddin Kamba**, Kadiv Humas Jogja Police Watch

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Guru 'Untulan' Masa Pandemi

### M Basuki Sugita

menggantikan mengajar peserta didik di depan kelas. Tentu saja tidak ada makan siang gratis, guru 'untulan' mendapat honor dari guru utama sesuai kesepakatan mereka berdua.

Pada masa pandemi Covid-19 ini kemunculan guru 'untulan' makin marak seiring pembelajaran dalam jaringan (daring) yang jamak dilakukan sekolah-sekolah. Setahun lalu hanya sebagian kecil guru yang mampu mengoperasikan aplikasi pembelajaran daring semisal *google classroom*, *google drive*, *google meet*, *jitsi meet*, *google form*, *google suit* sampai membuat video pembelajaran sendiri.

Di tengah tuntutan meleak teknologi internet tinggi mau tidak mau pola piker guru sebagai pengajar harus berubah mengikuti tuntutan zaman. Bagi guru yang enggan belajar teknologi terkini seperti internet, tentu menemui kendala melaksanakan pembelajaran daring.

Jadi guru 'untulan' zaman pandemi Covid-19 ini, bukan lagi menggantikan posisi pegang kapur di depan kelas. Namun lebih sebagai penyedia bahan ajar harian sampai tuntutan ulangan harian, tes tengah semester, tes akhir rapor sampai pembuatan e-rapor. Dalam arti mereka lebih sibuk di depan komputer saat pembelajaran daring dibanding guru utama.

### Lebih Lancar

Apakah guru 'untulan' merugikan kepentingan siswa, masyarakat atau satuan pendidikan? Belum ten-

tu! Karena berkat jasa guru 'untulan' pembelajaran daring relatif lebih lancar. Dan jangan lupa rata-rata guru 'untulan' relatif berusia muda, penuh vitalitas. Mereka rata-rata meleak teknologi internet dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Fenomena guru 'untulan' mencerminkan karut-marut pendidikan nasional secara luas. Mudah dijumpai guru yang mengantongi tunjangan profesi yang jamak disebut guru profesionalpun belum tentu meleak internet. Bahkan ada guru berijazah S-2 lulusan PTN ternama sama sekali tidak mampu mengoperasikan komputer paling sederhana sekalipun.

Apa boleh buat? Pandemi Covid-19 ini membuka sedikit tirai persoalan pendidikan nasional. Kualitas guru terlihat jelas dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman teknologi internet. *Sugeng rawuh* guru 'untulan'. □

\*) **M Basuki Sugita**, pendidik tingkat di Desa Kaliputu Kudus

## Pojok KR

Merapi kembali keluaran awan panas. -- **Kewaspadaan jangan sampai kendor!**

\*\*\*

DKPP pecat Ketua KPU Arief Budiman. -- **Pelajaran bagi komisioner lain.**

\*\*\*

Pandemi, bisnis kuliner tetap tumbuh. -- **Bisa disambi 'work from home'.**

*Beraba*

### Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

### Memantik Semangat Belajar

**PADA** pertengahan tahun 2020 lalu pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran Covid-19. Pembelajaran tatap muka ditiadakan, metode pembelajaran dirombak dan dimodifikasi sedemikian rupa agar tetap bisa dilaksanakan meski dalam keterbatasan. Tujuannya adalah agar anak tetap mendapatkan hak belajarnya, terlindung dari penyebaran virus, dan pada akhirnya kelak akan mampu menjadi SDM yang unggul ketika masa pandemi ini berakhir. Itulah harapan masyarakat. Harapan yang masih melekat karena pandemi hanya bersifat sementara dan proses pembelajaran akan berlangsung normal pada Januari 2021

Namun apakah realita berjalan sesuai rencana? Ternyata, fakta menunjukkan bahwa garis akhir Corona masih belum terlihat. Grafik jumlah pasien terinfeksi Corona justru semakin naik. Inilah alasan kuat dari pemerintah untuk menerapkan PSBB kembali. Ada tiga poin aturan yang perlu diperhatikan dalam PSBB jilid dua ini, pertama meniadakan kegiatan konsultasi belajar, kedua meniadakan program guru kunjung, dan ketiga

kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring.

Mengingat ini adalah PSBB yang kedua kalinya, seharusnya masyarakat sudah tidak begitu kaget lagi dengan segala atributnya. Masyarakat sudah mampu belajar mengantisipasi, menimbang dan melaksanakan hal-hal apa yang harus dilakukan. Orang tua juga perlu berlapang dada untuk lebih lama lagi menjadi 'guru' sementara bagi putra-putrinya di rumah. Di masa pandemi, rumah adalah sekolah. Orang tua lah yang menjadi pemeran utama sebagai pemantik nyala semangat belajar anak. Orang tua adalah pemegang kontrol terhadap anak. Jangan sampai orang tua lalai sehingga siswa menjadi tidak terkontrol. Sekolah hanya akan menjadi sekadar gedung tanpa peran penting orang tua yang mampu mendampingi putra-putrinya belajar.

Semoga saja 'badai' pandemi ini segera berakhir. Pada masa yang demikian, kita akan mendapatkan banyak hikmah pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan mendatang.

\*) **Tya Asrining SPd, Guru SD Negeri Widoro, Jalan Perumka Lempuyangan Danurejan Yogya.**

**ISTILAH** 'untulan' dikenal dalam perbisnisan burung *love bird*, sebagai burung pendamping atau pasangan hidupnya. 'Untulan' disediakan sebagai pasangan *love bird* yang oleh penernakannya sudah ditentukan sebagai burung lomba atau setidaknya masteran.

Pada masa pandemi Covid-19 ini istilah guru 'untulan' kembali mencuat di tengah gegap gempita pembelajaran jarak jauh (PJJ), utamanya melalui jaringan teknologi internet. Dalam lingkup pendidikan nasional sebenarnya sudah relatif lama dikenal istilah guru 'untulan', yaitu sosok guru yang bekerja dan mendapat honor atas alih tugas tanggung jawab guru lain. Mereka bekerja bukan dibayar satuan pendidikan, komite apa lagi pemerintah.

Meski guru 'untulan' atau guru 'pocokan' bekerja untuk mendidik para siswa sebagai calon pemimpin bangsa, namun jerih payah mereka tidak pernah tercatat dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik). Mengapa fenomena guru 'untulan' sulit diberantas dalam lingkup pendidikan nasional?

### Ketidakterbatasan

Kemunculan fenomena guru 'untulan' menandakan adanya ketidakbatasan dalam mekanisme pengajaran di lingkup satuan pendidikan nasional. Mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebelum masa pandemi Covid-19, guru 'untulan' sering kali muncul menggantikan tugas pembelajaran guru lain di depan kelas. Artinya guru utama-mengantongi Surat Keputusan (SK) pembagian tugas mengajar-tinggal ongkang-ongkang di kantor. Sementara guru 'untulan' berjabaku

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

### Kedaulatan Rakyat

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwardono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting). **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkyk23@yahoo.com](mailto:iklankrkyk23@yahoo.com), [iklankrkyk13@gmail.com](mailto:iklankrkyk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Dislay... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaran... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%